
UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN MELALUI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROVINSI BANTEN

¹Nely Hartika, ²Ipah Ema Jumiati, ²Liza Mumtazah Damarwulan, ²Agung Sudrajat, ²Widyawati, ³Rudiansyah,

¹Universitas Banten Jaya, ²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ³Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

Abstract

This background is that there is an increase in the unemployment rate in Banten Province, and available labor resources in the labor market in Banten Province are growing every year. But on the other hand, due to the increase in the unemployment rate every year and the increase in the number of workers, the existing workforce is not being absorbed properly. The purpose of this research is to find out how efforts to deal with unemployment through efforts to reduce unemployment through micro, small and medium enterprises (UMKM) in Banten Province. In this study, researchers used qualitative research methods. Small and medium enterprises in Banten Province absorb 235,022 workers, namely the food industry with 91,476 workers. followed by the garment industry with 34,508 people, and the wood and cork industry excluding furniture with 3,056 people. MSMEs have made a major contribution to economic growth and have had a positive impact on people's welfare, especially those in Banten Province

Keywords:

Unemployment, industry, UMKM

Abstrak

Latar belakang ini adalah adanya peningkatan angka pengangguran di Provinsi banten, sumber daya tenaga kerja tersedia di Pasar tenaga kerja di Provinsi Banten tumbuh setiap tahun. Namun di sisi lain, akibat kenaikan angka pengangguran setiap tahunnya dan bertambahnya jumlah tenaga kerja, angkatan kerja yang ada tidak terserap dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana upaya penanganan pengangguran melalui upaya mengurangi pengangguran melalui usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di Provinsi Banten. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Usaha kecil dan menengah di Provinsi Banten menyerap tenaga kerja sebanyak 235.022, yaitu industri makanan sebanyak 91.476 tenaga kerja. diikuti oleh industri garmen sebanyak 34.508 orang, industri kayu dan gabus tidak termasuk mebel sebanyak 3.056 orang. UMKM telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Banten.

Article history:

Submission December 27 2022

Revision January 10 2023

Accepted May 18 2023

Published June 30 2023

***Corresponding author**

Email:

nelyhartika@unbaja.ac.id

Kata kunci: Pengangguran, industri, UMKM

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease atau COVID-19 diakui sebagai pandemi dan mulai mewabah di negeri ini pada pertengahan bulan Maret 2020, penyakit ini mewabah hampir keseluruh negara dibelahan dunia. World Health Organization merekomendasikan salah satu langkah menghambat penyebaran COVID-19 adalah dengan menerapkan pembatasan perjalanan, karantina, pembatasan jam malam, pengendalian bahaya di tempat kerja, penutupan fasilitas umum dan termasuk pembatasan pada proses belajar mengajar disekolah dan perguruan tinggi diterapkan social distancing. Pandemi COVID-19 ini berdampak buruk pada berbagai sektor diantaranya sektor sosial dan ekonomi yang sangat terpuruk dan dampak yang sangat terlihat adalah tingginya angka pengangguran.

(Aidil, 2017) menjelaskan "Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan tidak menerima penghasilan yang diinginkan". Pasalnya, jumlah penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu namun lapangan kerja sedikit dan kurangnya perhatian pemerintah membuat jumlah pengangguran semakin meningkat. Pengangguran merupakan salah satu masalah penting di dunia, demikian pula di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang. Jumlah ini naik 0,06 juta atau 60 ribu orang dibandingkan Februari 2019. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2020 turun tipis dari 5,01 persen menjadi 4,99 persen, Naiknya angka pengangguran ini terjadi seiring peningkatan angkatan kerja Indonesia per Februari 2020 yang mencapai 137,91 juta orang atau naik 1,73 juta orang. Angka ini juga belum mencerminkan dampak Corona atau COVID-19 yang mulai terasa pada April 2020 (situs <https://www.bps.go.id>).

Tingginya tingkat pengangguran juga menjadi salah satu masalah besar di Provinsi Banten. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten memperlihatkan angkatan kerja Provinsi Banten mengalami penurunan dari 6,14 juta orang pada Februari 2019 menjadi 6,11 juta orang pada Februari 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten meningkat dari 7,58 persen pada Februari 2019 menjadi 8,01 persen pada Februari 2020. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan dari 66,19 persen menjadi 64,46 persen. TPAK sebesar 64,46 persen berarti dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 64 hingga 65 orang yang aktif bekerja secara ekonomi. Demikian juga lapangan kerja yang tersedia belum dapat menampung tingginya angkatan kerja di Provinsi Banten bahkan akibat pandemic COVID-19 jumlah penduduk yang bekerja menjadi semakin berkurang.

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah TPT, yang merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah

angkatan kerja mengalami penurunan dari 6,14 juta orang pada Februari 2019 menjadi 6,11 juta orang pada Februari 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten meningkat dari 7,58 persen pada Februari 2019 menjadi 8,01 persen pada Februari 2020.

Perkembangan dunia ekonomi dan bisnis saat ini telah mengalami pergeseran paradigma, yaitu dari model ekonomi berbasis sumber daya ke model ekonomi berbasis pengetahuan atau inovasi. Perubahan ini terjadi karena model ekonomi berbasis sumber daya yang selama ini dianggap cukup efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis, belum mampu mengadaptasi dan beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi lingkungan bisnis yang berbeda. Seiring waktu, kebutuhan masyarakat meningkat karena orang tidak terpenuhi. Populasi semakin meningkat, teknologi informasi semakin maju, standar hidup berubah, budaya semakin maju, sehingga kebutuhan semakin kaya dan beragam menjadikan pembangunan ekonomi sebagai aliran pembangunan ekonomi modern harus dilakukan inovasi untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat menyerap hingga 96% tenaga kerja Indonesia. Menurut data terakhir tahun 2018, jumlah usaha mikro mencapai 58,91 juta, jumlah usaha kecil sebanyak 59.260 juta, jumlah usaha menengah sebanyak 4,987 juta. Berdasarkan (Syairozi & Susanti, 2018) menjelaskan "Karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan modal yang menonjol dan sumber daya yang relatif sedikit dan lemah". Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tergolong usaha kecil, namun dengan pemberdayaan yang tepat dan benar maka usaha kecil tersebut dapat berkembang pesat. (Gunartin, 2017) menjelaskan "Dalam sektor ekonomi yang berbeda, perlu dilakukan penguatan UMKM dengan memberikan peluang usaha bagi UMKM itu sendiri dan memperhatikan keberadaan UMKM sehingga dapat membangun struktur perekonomiannya sendiri di Indonesia". bahwa keberadaan UMKM akan membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemungkinan meningkatkan pendapatan masyarakat.

(Tanjung, 2016) menjelaskan bahwa "UMKM dapat menunjukkan kriteria dan karakteristik seperti permodalan dan perputaran kegiatan produksi, orientasi dan manajemen personalia". Dalam penjeleasan tersebut, UMKM juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran yang ada dengan mengadakan kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat tentang UMKM, sehingga masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai keinginan dan kemampuan masing-masing orang. Oleh karena itu UMKM harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai salah satu lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga dengan adanya UMKM tersebut maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkat dan jumlah pengangguran juga akan berkurang.

UMKM sebagai usaha masyarakat telah membuktikan diri tahan terhadap berbagai goncangan ekonomi bahkan mampu bertahan di saat krisis ekonomi (Sarfiah et al., 2019). Beberapa faktor yang mendukung keberdayaan dan kelangsungan hidup UMKM adalah adanya sumber daya manusia yang melimpah, ketersediaan bahan baku yang murah, permodalan usaha yang ringan, dukungan pemerintah dan kesepakatan harga jual produk antar UMKM. (Kurniawan dan Fauziah, 2014). UMKM terbukti dapat memberikan kontribusi positif terhadap lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Indonesia (Bustam, 2016; Kurniawan & Fauziah, 2014; Setiawan, 2015). Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM karena gaji diperhitungkan sesuai kapasitas kerja bekerja (Budiawan, 2013). Semakin banyak tenaga kerja yang kemungkinan diserap oleh UKM, semakin banyak dapat meningkatkan pendapatan per individu yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ahmadun, 2019; Sholikha, 2018).

Pertumbuhan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya sumber daya manusia, kendala modal dan saluran pemasaran (Gunartin, 2017). Oleh karena itu, pemerintah memerlukan pembinaan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi kendala dan tantangan yang semakin kompleks agar mampu bersaing dengan usaha sejenis dalam dan luar negeri. (2014). Pemerintah dapat berperan sebagai pemungkin dengan menyediakan permodalan, fasilitas pendukung dan jaringan pemasaran, serta berperan sebagai katalisator dalam rangka percepatan pengembangan usaha (Putra, 2015).

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah dengan 4 kabupaten, 4 kotamadya, 155 kecamatan dan 313 kecamatan serta 1.238 desa, dari segi jumlah penduduk yang sangat padat, banyak masyarakat Banten yang mengeluhkan perekonomian, hal ini disebabkan belum meratanya perekonomian. sistem yang diberlakukan oleh pemerintah. Ketiadaan tingkat perlindungan sosial telah menciptakan banyak masalah. Salah satunya adalah meningkatnya angka pengangguran di suatu daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut terus menurun. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk menjaga reputasi suatu negara atau daerah sebagai negara atau daerah dikatakan memiliki perekonomian yang maju yang dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya.

Pemerintah Provinsi Banten didorong untuk mengembangkan potensi desa sehingga mampu menyerap tenaga kerja desa. Mengembangkan usaha kecil menengah (UMKM) dengan memanfaatkan potensi desa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pelaku UMKM di Provinsi Banten mencapai 153.000. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM, agen UMKM dilatih dan didukung untuk memperluas pasar melalui e-commerce dan internet marketing. Selain itu, pelaku UMKM didorong dan didukung untuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha menengah dan besar. Mempermudah pengurusan sertifikat pendirian koperasi, izin

produk olahan, izin BPOM, sertifikat halal, penunjang kemasan yang eye catching dan menarik.

Pengangguran adalah seseorang yang berada dalam angkatan kerja dan ingin mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukannya (Mahdar, 2015). Selain itu, Mahdan (2015) menjelaskan bahwa pengangguran diartikan sebagai seseorang yang memasuki angkatan kerja dan aktif mencari pekerjaan dengan gaji tertentu, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tentang indeks ketenagakerjaan, pengangguran adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi Anda sedang mencari pekerjaan atau merencanakan sesuatu bisnis baru atau penduduk tidak mencari pekerjaan karena mereka telah setuju untuk bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Dalam ilmu kependudukan (demografi), pengangguran adalah orang yang sedang mencari pekerjaan, dan mereka dikelompokkan ke dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Menurut kategori umur, penduduk aktif mencakup penduduk berusia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan penduduk yang tidak sedang mencari pekerjaan tidak termasuk dalam penduduk aktif. Jadi, tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang menganggur (Raharja dan Manurung, 2004:329).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah:

- 1). Status seseorang dalam angkatan kerja (15-64 tahun) menginginkan pekerjaan, tetapi tidak bisa mendapatkannya;
- 2). Seseorang yang berada dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan gaji tertentu, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan;
- 3). Tindakan yang diambil jika seseorang tidak bekerja tetapi tidak aktif mencoba selama empat minggu terakhir untuk menemukan pekerjaan;
- 4). Orang yang sedang mencari pekerjaan dan termasuk dalam kelompok penduduk yang disebut pergi bekerja. Orang berusia antara 15 dan 64 tahun dan sedang mencari pekerjaan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki banyak definisi yang berbeda dalam setiap dokumen menurut beberapa otoritas atau organisasi dan bahkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) No. 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1). Usaha mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh perorangan atau organisasi badan usaha swasta yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini;
- 2). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai atau bagian dari usaha besar dan menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil berdasarkan ketentuan Undang-undang ini;
- 3). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produksi yang otonom, dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari korporasi yang dimiliki, dikuasai atau sebagian, langsung atau tidak

langsung, usaha kecil atau jumlah kekayaan bersih yang besar atau hasil penjualan setiap tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selanjutnya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya.

Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi “kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM.

Paket ini dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Kamis, 15 Oktober 2015, pukul 20:32. Harap Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan instrumen dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM. Pemerintah menyadari pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada pertengahan tahun 2014, pertumbuhan kredit secara tahunan tetap berada di level 16,65%, kemudian turun menjadi 11,6% di akhir tahun 2014 dan 10,4% di akhir tahun 2015. Tren ini juga terlihat pada penyaluran kredit korporasi, usaha mikro, kecil dan menengah. (UKM) meningkat hanya sebesar 9,2% pada akhir Juni 2015. Tren perlambatan kredit tersebut tentunya terkait dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga KUR yang lebih besar.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana upaya penanganan pengangguran melalui upaya mengurangi pengangguran melalui usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif dapat ditemukan di banyak buku. Antara lain, Ali dan Yusof (2011)

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai: Setiap survei yang tidak menggunakan prosedur statistik sekarang disebut "kualitatif", seolah-olah itu sendiri merupakan tanda kualitas. Definisi Ali dan Yusof menekankan kurangnya penggunaan alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini tentunya untuk memudahkan pembedaan antara penggunaan metode kualitatif dan penggunaan metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif bergantung pada penggunaan prosedur komputasi dan analisis statistik. Sedangkan metode kualitatif lebih menekankan pada mengamati fenomena dan memeriksa sifat makna dari fenomena tersebut. Analisis dan wawasan penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan frase yang digunakan. Dengan demikian, Basri (2014) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif menitikberatkan pada proses dan signifikansi hasil. Perhatian penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada faktor manusia, objek dan kelembagaan, serta hubungan atau interaksi antara faktor-faktor tersebut, dengan tujuan untuk memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kegiatan ekonomi di suatu wilayah selalu didukung oleh peningkatan kegiatan ekonomi sektoral dan peningkatan pula kegiatan ekonomi sektoral atau kegiatan subsektornya yang didorong. Dengan demikian, industri yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah akan ditopang oleh pertumbuhan kegiatan ekonomi pada subsektor terkait. Hal tersebut diatas mendukung berkembangnya berbagai jenis UMKM di Provinsi Banten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Banten.

Menurut Dumairy (1999), masyarakat memiliki dua peran penting dalam Ekonomi, dalam konteks pasar, berada di sisi penawaran dan permintaan. Di sisi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen, sedangkan di sisi penawaran kepada penduduk yang bertindak sebagai produsen. Jumlah penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif yang didukung oleh kekayaan alam yang beraneka ragam merupakan modal dasar pembangunan. Permasalahan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk yang masif di negara berkembang akan menimbulkan sejumlah masalah dalam upaya pembangunan, karena di satu sisi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan menyebabkan jumlah pekerja meningkat hampir pesat. Di sisi lain, kemampuan negara untuk menciptakan lapangan kerja sangat terbatas dan ketimpangan tersebut menimbulkan banyak masalah. (Sukirno, 2006).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Bekerja, Pengangguran dan Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Banten (Jiwa)

Tahun	Bekerja	Pengangguran	Total Angkatan Kerja
2005	3.461.508	661.618	4.123.126
2006	3.333.495	890.489	4.223.984
2007	3.383.661	632.762	4.016.423
2008	3.668.895	656.56	4.325.455
2009	3.704.778	652.462	4.357.240
2010	4.583.085	726.377	5.309.462
2011	4.529.660	680.564	5.210.224
2012	4.605.847	519.21	5.125.057
2013	4.637.019	509.286	5.146.305
2014	4.853.992	484.053	5.338.045
2015	4.825.460	509.383	5.334.843

Sumber : Badan Pusat Statistik Banten (diolah).

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan angkatan kerja, pengangguran total tenaga kerja dari tahun 2005 hingga 2015. Dalam hal ini, kami bisa menyimpulkan bahwa tabel di atas menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tahun demi tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya tenaga kerja tersedia di Pasar tenaga kerja di Provinsi Banten tumbuh setiap tahun. Namun di sisi lain, akibat kenaikan angka pengangguran setiap tahunnya dan bertambahnya jumlah tenaga kerja, angkatan kerja yang ada tidak terserap dengan baik.

Penduduk dan PDRB, membuat sukses Pembangunan ekonomi berarti menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang seimbang. Salah satu bidang yang benar-benar dapat mengurangi pengangguran adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dimana UMKM kini berperan sebagai pengukur aset perkotaan dan pedesaan dalam konteks UKM. Selain itu, UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, saat ini UMKM dinilai lebih tahan menghadapi kenyataan tersebut, sedangkan perusahaan besar stagnan atau bahkan berhenti beroperasi. Data UMKM di Provinsi Banten tahun 2018 tercatat sebanyak 6.495 usaha mikro 3.595 usaha kecil dan 222 usaha menengah di kota Serang. Data tersebut menunjukkan perkembangan UMKM di Provinsi Banten saat ini. Dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM	% Mikro & Kecil
1	Kabupaten Lebak	49.498	825	15	50338	0
2	Kabupaten Tangerang	41.155	0	0	41.155	0
3	Kabupaten Serang	22.667	3.958	294	28.999	0
4	Kota Tangerang	11.079	533	34	11.746	0
5	Kota Cilegon	6.446	100	0	6.546	0
6	Kota Serang	6.495	3.595	222	10.321	0
7	Kota Tangerang Selatan	7.094	2.488	0	3.582	0
8	Kabupaten Pandeglang	900	100	2	1.002	0

Sumber: <https://statistik.bantenprov.go.id/>

Berdasarkan tabel diatas sangat jelas terlihat sektor UMKM di Provinsi Banten mengalami perkembangan atau peningkatan khususnya di Kabupaten Lebak yang jumlah UMKM nya mencapai 50.338. Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memberdayakan 58.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM itu mampu meningkatkan pendapat ekonomi masyarakat juga meminimalisasi kemiskinan dan pengangguran.

Usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis global yang melanda dunia, kontribusi UMKM dalam roda perekonomian masih tetap berdiri tegak. Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah yang sedang memajukan sektor UKM. Berikut ini data PDRB (Produk Domestik Bruto) Provinsi Banten berdasarkan Kabupaten/Kota pada Tahun 2017-2019.

Tabel 3. PDRB Provinsi Banten Tahun 2017-2019 (Dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Kab. Pandeglang	17.866.428	18.941.701	19.895.912
Kab. Lebak	18.683.739	19.767.366	20.908.728
Kab. Tangerang	86.964.026	92.124.600	97.539.478
Kab. Serang	49.154.636	51.774.398	54.404.473
Kota Tangerang	101.274.679	107.267.321	111.890.543
Kota Cilegon	66.444.529	70.409.394	74.385.223
Kota Serang	20.153.022	21.455.251	22.836.709
Kota Tangerang Selatan	52.098.555	55.936.156	60.044.979

Sumber: (BPS Provinsi Banten, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, tingkat PDRB di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu penyumbang PDRB di Provinsi Banten yaitu sektor UKM. Perkembangan UMKM menjadi indikator dalam keberhasilan peningkatan perekonomian suatu wilayah terutama pada wilayah dengan tingkat PDRB yang rendah terutama provinsi Banten.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III 2019 Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) perekonomian Banten atas dasar harga berlaku mencapai Rp168,91 triliun. Hingga triwulan III 2019 (c-to-c), perekonomian Provinsi Banten tumbuh sebesar 5,40%. Pertumbuhan didorong oleh semua sektor usaha kecuali transportasi dan pergudangan serta pasokan listrik dan gas. Pertumbuhan terkuat tercatat pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,94%. Pada Agustus 2019, angkatan kerja Provinsi Banten mencapai 5,56 juta orang. Peningkatan 230.000 karyawan dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Banten adalah sektor industri dan komersial, masing-masing sebesar 24,09% dan 20,91%. Mayoritas penduduk bekerja di Banten berstatus pekerja/karyawan (3,12 juta orang). Tingkat penyerapan tenaga kerja resmi sebesar 58,74% pada Agustus 2019.

Tingkat pengangguran terdaftar adalah persentase penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, termasuk yang telah dipekerjakan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (OPR) Provinsi Banten mencapai 8,11% atau 490,81 ribu orang. Lebih rendah atau lebih rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 8,52%. TPT perkotaan mencapai 7,58% atau lebih rendah dari daerah perdesaan sebesar 9,48%. Hal ini juga terlihat pada struktur pekerjaan utama. Penurunan terbesar pada pekerjaan primer di bidang pertanian, pertambangan dan penggalian turun dari 13,20% pada Agustus 2018 menjadi 9,94% pada Agustus 2019. Pada periode yang sama, musiman tenaga kerja di sektor pertanian menurun dari 3,67% menjadi 2,27%. Pemerintah Provinsi Banten memimpin pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangannya untuk menghubungkan pusat manufaktur dan jasa agar berjalan lebih lancar dan efisien.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) berpotensi menyediakan lapangan kerja yang tinggi dan kesempatan kerja baru. Sehingga bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Banten. Pada tahun 2019, UKM di Provinsi Banten didominasi oleh industri makanan mencapai 44,60% dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang. Menurut survei tahunan terhadap usaha kecil dan menengah, terdapat 113.000 usaha yang tersebar di kabupaten-kabupaten dalam kota provinsi Banten.

Usaha kecil dan menengah di Provinsi Banten menyerap tenaga kerja sebanyak 235.022, yaitu industri makanan sebanyak 91.476 tenaga kerja. diikuti oleh industri garmen sebanyak 34.508 orang, industri kayu dan gabus tidak termasuk mebel sebanyak 3.056 orang. Dan tidak kurang dari 63,36% adalah laki-laki dan sisanya 36,64% adalah perempuan. Sedangkan untuk kelompok pekerja menurut tingkat pendidikan diketahui bahwa 39,43% hanya tamat SD, 26,76% tamat SLTP, 14,01% dan 13,81% tidak tamat SD dan sisanya 5,98% SMK pelatihan. , gelar ke-3 atau lisensi.

Oleh karena itu, keberadaan UMKM dinilai mampu menyeimbangkan perekonomian dalam berbagai aspek sosial di daerah terpencil dan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa harus pergi ke kota besar. Selanjutnya, jumlah UKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia sehingga UMKM berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap keseimbangan perekonomian domestik terutama di Provinsi Banten.

UMKM merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional. Semakin banyak UMKM yang beroperasi secara efektif dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan semakin positif dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, namun jika jumlah UMKM meningkat tetapi tidak efektif dan dengan sumber daya manusia yang rendah maka pelaku UMKM tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena tidak memberikan

kontribusi terhadap PDB suatu negara. UMKM telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Banten.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten terus meningkat bahkan dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Jumlah UMKM pada tahun 2006 sebanyak 1.485 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 30,51%. tahun 2007 jumlah UMKM sebanyak 1.519 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 38,81%, tahun 2008 jumlah UMKM sebanyak 1.558 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 34,80% dan tahun 2009 jumlah UMKM mencapai 1.598 dengan tingkat pertumbuhan 34,80%. pertumbuhan ekonomi sebesar 42,78%. dan pada tahun 2010 jumlah UMKM mencapai 1.631 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 52,45%. Pertumbuhan UMKM menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan dan pemberdayaan usaha perseorangan dan organisasi usaha di Provinsi Banten, mengingat UMKM merupakan penyumbang utama laju pertumbuhan ekonomi dan UMKM memiliki peranan penting untuk menangani jumlah pengangguran di Provinsi Banten

KESIMPULAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan usaha mikro (UKM) memiliki potensi untuk menyediakan lapangan kerja yang tinggi dan kesempatan kerja baru. Sehingga bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Banten. Pada tahun 2019, UKM di Provinsi Banten didominasi oleh industri makanan yang mencapai 44,60% menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang. Menurut survei tahunan terhadap usaha kecil dan menengah, terdapat 113.000 usaha yang tersebar di seluruh kantor pemerintahan kota di Provinsi Banten. Usaha kecil dan menengah di Provinsi Banten mempekerjakan 235.022 karyawan, terutama industri makanan dengan 91.476 karyawan. Selanjutnya industri garmen sebanyak 34.508 orang, industri kayu dan gabus di luar meubel sebanyak 3.056 orang UMKM telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengatasi angka pengangguran di Provinsi Banten.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus segera melakukan pendataan mengenai pelaku UMKM yang terdampak kenaikan harga bahan baku atau terdampak pandemic covid-19. Dengan demikian, penanganan dalam bentuk stimulus ekonomi bisa segera diberikan untuk mencegah keterpurukan bagi pelaku UMKM. Tak kalah penting sektor perbankan juga punya tugas dalam rangka restrukturisasi kredit bagi pelaku UMKM. Perkembangan UMKM di Provinsi Banten tidak terlepas dari beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, sulitnya permodalan dan jalur pemasaran. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan pembinaan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi kendala dan tantangan yang semakin kompleks agar mampu bersaing dengan usaha sejenis dalam dan luar negeri. Pemerintah dapat berperan sebagai pendukung dengan menyediakan permodalan,

fasilitas pendukung dan jaringan pemasaran, serta berperan sebagai katalis untuk mendorong pengembangan usaha

REFERENSI

- Ahmadun. (2019). Pemberdayaan UMKM Bagi Usaha Keluarga dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kampung Jangkar Desa Mekarwangi Cariu Bogor. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35–42.
- Berisha, G., & Pula, J. S. (2015). *Defining Small and Medium Enterprises: a critical review*. *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*, 1(1), 17–28.
- BPS Provinsi Banten (2018). *Provinsi Banten dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Banten.
- Budiawan, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak. *Economics Development Analysis Journal*, 2(1), 175–192.
- Bustam, N. H. (2016). Pengaruh Jumlah Unit, PDB dan Investasi UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Periode 2009-2013. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 250–261.
- Fatai, A. (2011). *Small and medium scale enterprises in nigeria: the problems and prospects*. *Social Sciences*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/03670240290014598>
- Gunartin. (2017). Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hafni, R., & Rozali, A. (2017). Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Ilmu Ekonomi Dan Studin Pembangunan*, 15(2), 77–96. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/1034/pdf_58
- Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(2), 103–220.
- Prasetyo, A., & Huda, M. (2019). Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 18(1), 26–35. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v18i1.309>
- Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(April), 1–10.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 41–52